

# PERANAN MEDIA CETAK DALAM PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA\*

Oleh : Fajar Winarni\*\* & Harry Supriyono\*\*\*

## Abstract

*The regulation on environmental information is new, which is stated in Act Number 23 of 1997 regarding Environmental Management. The print media as one of the environmental constituents must share the responsibility in distributing the information, at least for assisting the community which usually is a potential victim of environmental pollution.*

*The aim of this research is to find out how the print media implements its function as a provider of environmental information and to understand the obstacles in providing that information.*

*The research was done within the Special Province of Yogyakarta. The data were collected by carrying out interview and giving questionnaire (combination of closed and open system) to Kedaulatan Rakyat and Kompas readers. The samples were determined by using the purposive sampling method. The data were analyzed qualitatively.*

*The research shows that in implementing its function as a social control institute, the print media files the report which contain the environmental substance, whereas as a social education institute the print media provides critical comment and information to the community. The obstacles in providing environmental information can be divided into internal and external obstacles.*

## I. PENGANTAR

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Sejak saat itu Indonesia juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, tepatnya sejak Repelita II, yang dicantumkan dalam GBHN 1973. Pencantuman dalam GBHN ini kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang telah diganti dengan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pengaturan mengenai informasi lingkungan hidup merupakan hal yang baru, sebab dalam UULH belum diatur secara eksplisit. Dengan adanya UUPLH, pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasannya di antaranya mengemukakan bahwa informasi lingkungan ini dapat berupa data; keterangan; atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan

\* Laporan Penelitian

\*\* S.H.; Pengajar di Fakultas Hukum - UGM

\*\*\* S.H., M.Hum.; Pengajar di Fakultas Hukum - UGM

dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup; dan rencana tata ruang. Dengan demikian hak atas informasi ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peranan media cetak dalam mengangkat masalah-masalah lingkungan mulai terasa sejak beberapa tahun belakangan ini. Adapun pengertian media cetak, yang dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, disebut dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Beberapa kasus lingkungan mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan pemerintah setelah media cetak memberitakannya, misalnya kasus kebakaran hutan; kasus pencemaran oleh PT Inti Indorayon Utama di Medan; kasus Mega Proyek Parangtritis di Yogyakarta; kasus impor limbah padat dari Singapura untuk reklamasi di Bangka; dan sebagainya. Informasi yang diperoleh melalui media cetak memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap mental masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan aktif menjaga kelestarian lingkungan, sebab media cetak dapat menjadi pembawa pesan, penggerak, dan motivator dari sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat. Banyaknya kasus lingkungan mencerminkan efektivitas pengelolaan hidup masih jauh dari harapan, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Media cetak sudah sepatutnya turut bertanggung jawab dalam memperjuangkan masalah lingkungan, sekurang-kurangnya membantu masyarakat yang umumnya menjadi penderita potensial dari

pencemaran lingkungan. Di samping itu mengangkat permasalahan lingkungan hidup ini melalui media cetak adalah sangat efektif, karena masalah yang diangkat merupakan masalah yang aktual, sehingga media cetak dapat memberikan masukan-masukan yang berharga pada masyarakat untuk meningkatkan kepekaan dan kepeduliannya terhadap persoalan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan peranannya, media cetak berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat masyarakat serta melakukan kontrol sosial, sehingga perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, media cetak dan masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana media cetak melaksanakan fungsinya sebagai penyebar informasi lingkungan hidup, dan hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam penyebaran informasi tersebut?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Media Cetak Sebagai Wahana Pendidikan dan Kontrol Sosial**

Meskipun masalah lingkungan hidup sudah dikenal lama di Indonesia, tetapi penangananannya menurut pendekatan ekosistem masih tergolong baru, sedangkan berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu peranan media cetak sangat penting dalam penyebaran informasi untuk menumbuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Di samping diatur dalam UUPH, hak atas informasi ini diatur pula dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia yaitu dalam Bab VI tentang Hak Atas Kebebasan Informasi Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu media massa baik cetak maupun elektronik, merupakan wahana yang vital dalam mengembangkan kesadaran masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan peran serta masyarakat. Fungsinya sebagai *social control* dan *social education* merupakan penunjang yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan fungsi media cetak, yang dalam penelitian ini dipilih media cetak Kedaulatan Rakyat dan Kompas, sebagai *social control* di bidang lingkungan hidup adalah menurunkan tulisan-tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup dilengkapi dengan foto-foto atau ilustrasi, misalnya perusahaan hutan, berita dan foto-foto mengenai abrasi air laut, penambangan pasir liar, perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup, seperti laporan bersambung mengenai usaha masyarakat dan mahasiswa yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan hidup. Sedangkan dalam fungsinya sebagai *social education*, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan terhadap masyarakat. Dari tulisan-tulisan yang dimuat tersebut tampak bahwa sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup melalui media cetak masih kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden pembaca Kedaulatan Rakyat dan Kompas, diperoleh data sebagian besar dari mereka memahami maksud dan tujuan informasi lingkungan (87%), namun dari 60 orang tersebut 62% menjawab tidak tahu kalau hak mereka atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh

Undang-undang, dan 33% mengetahuinya dari penyuluhan, sedangkan 5% tidak menjawab. Padahal menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUPH disebutkan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Apabila masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa haknya atas informasi lingkungan hidup dilindungi oleh Undang-undang, tentunya mereka belum dapat berperan secara maksimal untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di berbagai negara, hak ini diatur dalam konstitusi yang dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu. Di Indonesia, secara konstitusional hak subyektif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 UUPH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...", serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan kepada Negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini juga diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op-cit*, hal. 95, 96.

Bab VIII tentang Hak Kesejahteraan Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari kedua media cetak tersebut telah ada penunjukan wartawan yang khusus ditugasi meliput masalah lingkungan hidup, dengan kriteria mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungan hidup, perlu sering mewawancarai berbagai narasumber dan aktif menggali bahan cerita, serta mempunyai dasar pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang memadai. Untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman wartawan mengenai masalah lingkungan hidup yaitu dengan mengirim mereka ke seminar-seminar, dan meninjau tempat-tempat wisata. Bahkan telah ada pedoman peliputan lingkungan yang dihasilkan oleh lokakarya "Meliput Lingkungan Untuk Media Cetak", 24-29 Oktober 1994 di Maninjau yaitu:

1. Ruang lingkup bahan lingkungan hidup itu luas, karena mencakup semua aspek kehidupan;
2. Masalah lingkungan hidup dan dampaknya dapat meluas melintasi perbatasan wilayah atau negara;
3. Di wilayah atau negara yang sangat memerlukan pertumbuhan, tetapi memiliki potensi bagi kerusakan ekologi, masalah lingkungan hidup semakin perlu mendapat perhatian;
4. Lingkungan hidup itu kompleks, sering bersifat teknis, dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti politik, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, atau sosial;
5. Laporan liputan lingkungan hidup dapat berdampak emosional terhadap khalayak, sehingga dapat menimbulkan simpati dan empati serta pro dan kontra;
6. Wartawan perlu memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup, yang dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat luas. Karena banyak orang hanya menggunakan laporan media massa sebagai satu-satunya

sumber informasi lingkungan hidup, maka wartawan berperan sebagai pendidik tunggal dalam masalah ini;

7. Wartawan perlu terjun langsung ke tempat kejadian untuk menghasilkan liputan lingkungan hidup yang komprehensif;
8. Wartawan dapat berpihak kepada pendukung dan pembela kelestarian lingkungan hidup;
9. Wartawan harus tetap bersikap jujur dan bertanggung jawab, sehingga dapat tetap mempertahankan kredibilitas liputannya;
10. Laporan lingkungan hidup selain menampilkan problem dapat pula memuat saran-saran;
11. Penyiaran hasil liputan yang tepat waktu dan akurat lebih diperlukan dalam masalah lingkungan hidup dibandingkan dengan penyiaran banyak masalah lain, karena penanggulangan masalah lingkungan hidup sering memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat pada waktunya;
12. Masalah lingkungan hidup sering memerlukan upaya liputan berkelanjutan.

## **B. Hambatan-hambatan Dalam Peliputan Masalah Lingkungan Hidup**

Mengenai keberadaan rubrik khusus lingkungan hidup di media cetak yang dibaca oleh responden, 65% menjawab tidak ada dan 35% menjawab ada. *Harian Kompas* misalnya, walaupun sudah mempunyai halaman khusus setiap hari, halaman tersebut tidak selalu diisi dengan berita lingkungan hidup, tetapi menjadi satu dengan topik-topik lain yang kadang-kadang memang berkaitan, seperti kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependudukan. Dalam setiap rapat redaksi pun, ketika ada pemilihan materi untuk halaman satu, masih sering topik lingkungan hidup dikalahkan, karena para pembacanya belum banyak yang berminat mengikuti masalah lingkungan.

<sup>2</sup> Agnes Aristiarini, "Peliputan Investigasi Lingkungan di Indonesia", dalam Atmakusumah *et al* (eds), 1996, *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*, Cetakan I, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 49.

Untuk Harian Kedaulatan Rakyat, dulu pernah ada rubrik khusus lingkungan hidup yaitu Konsultasi Lingkungan bersama para pakar lingkungan hidup, namun sekarang rubrik ini tidak berjalan lagi. Hal ini juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ditemui dalam peliputan masalah lingkungan hidup yaitu:

1. *Hambatan internal*

- a Para wartawan lingkungan hidup kadang-kadang malas belajar dan merasa tahu mengenai lingkungan hidup (hasil wawancara penulis dengan Drs. Oka Kusumayudha, Pemimpin Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat).
- b Setiap media cetak mempunyai pilihan berita dan topik utama masing-masing, sehingga tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk mengantisipasi, menulis, dan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup. Kalaupun ada berita dengan topik lingkungan hidup, dari responden diperoleh data bahwa bentuk sajian yang paling sering muncul adalah artikel dan surat pembaca yaitu 37% menjawab artikel, 30% menjawab surat pembaca, 20% menjawab tajuk rencana dan 13% menjawab pendapat pakar. Di samping itu dilihat dari peliputan informasinya, dari responden para pembaca diperoleh jawaban 48% menyatakan bahwa pemberitaan lingkungan hidup di media cetak masih sedikit, 30% menjawab pemberitaannya kurang mendalam, 14% menjawab dalam mengangkat kasus lingkungan, pemberian datanya kurang terbuka, 10% menjawab beritanya sudah aktual namun perlu diperbanyak frekuensinya, dan 8% tidak menjawab. Dari jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya media cetak sudah peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, namun pengangkatan beritanya masih kalah dengan berita-berita yang lain misalnya berita ekonomi, politik, olah raga, terbukti masih sedikitnya berita lingkungan hidup yang diangkat.

2. *Hambatan eksternal*

- a Dalam mengangkat berita lingkungan hidup, seringkali menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya, karena ada kecurigaan dari pemerintah kepada masyarakat yang mempermasalahkannya kasus lingkungan yang selanjutnya media cetak akan menyebarluaskannya.
- b Lemahnya penegakan hukum lingkungan, sehingga dalam mengangkat kasus-kasus lingkungan tidak dapat seoptimal mungkin, misalnya ada kasus lingkungan yang ditutup-tutupi, penerapan sanksi administrasi, pidana, atau perdata kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup yang kurang tegas.

C. *Upaya Penanganan Hambatan*

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. *Internal*

- a Aktif mengirimkan wartawan dalam seminar atau lokakarya lingkungan hidup.
- b Membuat berita lingkungan hidup yang menarik para pembaca agar mereka menjadi peduli terhadap lingkungan hidupnya, sehingga diharapkan mereka dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c Mengajak wartawan mengunjungi tempat-tempat wisata untuk penyegaran kembali.

2. *Eksternal*

- a Menjalin hubungan antara pemerintah, LSM, dan media cetak.
- b Pemberian metode pemberitaan yang partisipatif, membuat penelitian, survei, dan memperbanyak narasumber dengan berbagai latar belakang untuk diwawancarai.

Mengenai penilaian responden tentang informasi lingkungan hidup yang diterima dari media cetak, secara umum mereka sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh media

cetak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan serta saran yang sifatnya membangun yang diberikan oleh responden khususnya berkaitan dengan pemberian porsi bagi topik lingkungan hidup, materi yang lebih aktual dan informasi yang tepat dan mendalam pada permasalahan lingkungan hidup, bentuk sajian yang lebih variatif dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu dari responden diperoleh keterangan bahwa 63% menyatakan pentingnya informasi lingkungan hidup dimuat di media cetak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mereka atas lingkungan hidupnya, dan 37% menyatakan bahwa pemuatan informasi lingkungan hidup di media cetak adalah cukup penting di samping berita-berita politik dan ekonomi.

Usaha telah dilakukan oleh media cetak, namun hasilnya belum maksimal. Masih banyak terjadi perusakan lingkungan hidup, pencemaran, kurangnya sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Jawaban responden menyatakan bahwa media cetak cukup membantu mereka dalam memperoleh informasi lingkungan hidup (63%), sedangkan 32% menjawab sangat membantu, dan hanya 2% yang menjawab kurang membantu, serta 3% tidak memberikan jawaban. Sementara itu realitas lingkungan hidup di Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi perhatian media cetak. Dari hasil penelitian, selama satu bulan (18 November 1999 s.d 17 Desember 1999) *Harian Kompas* menginformasikan 54 berita lingkungan hidup dan *Harian Kedaulatan Rakyat* menginformasikan 22 berita lingkungan hidup, dan sebagian besar di antaranya berbentuk artikel.

Untuk meningkatkan pemberitaan informasi lingkungan hidup, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengadakan lomba penulisan berita lingkungan hidup setiap tahunnya, dan sudah berlangsung sejak tahun 1990. Penilaian terhadap berita lingkungan hidup yang masuk dilakukan oleh tim juri yang dikoordinasikan oleh PWI, dengan memperhatikan isi, penyajian, dan bahasa.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya media cetak dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial di bidang lingkungan hidup adalah dengan menurunkan tulisan-tulisan yang memuat substansi lingkungan hidup, sedangkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat, media cetak bermaksud memberikan kritik dan penyuluhan pada masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal, karena masih sedikitnya pemberitaan informasi mengenai lingkungan hidup apabila dibandingkan dengan berita-berita lainnya yang mungkin lebih diminati oleh para pembacanya, sehingga sosialisasi peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup masih minim sekali.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian informasi lingkungan hidup adalah hambatan internal, seperti para wartawan lingkungan hidup kadang-kadang malas belajar, dan tidak setiap media cetak memberikan tempat yang sama untuk menyebarkan informasi lingkungan hidup; hambatan eksternal, seperti dalam peliputan berita menghadapi birokrasi pemerintah yang sulit untuk dikonfirmasi atau dimintai keterangannya, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, media cetak telah memberikan upaya dalam menanganinya.

#### B. Saran

1. Karena minimnya sosialisasi peraturan di bidang lingkungan hidup, maka media cetak perlu memperhatikan hal ini, agar masyarakat mengetahui bahwa hak mereka atas informasi dilindungi oleh Undang-undang.
2. Perlunya media cetak memberikan tempat atau halaman khusus bagi peliputan berita lingkungan hidup agar berita lingkungan hidup pun dapat bersaing dengan berita-berita yang lain.

<sup>3</sup> Ana Nadhya Abrar, *Op-cit*, tanpa halaman

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

- Abrar, Ana Nadhya, 1993, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, Cetakan I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Aristiari, Agnes, "Peliputan Investigasi Lingkungan di Indonesia", dalam Atmakusumah *et.al* (eds), 1996, *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*, Cetakan I, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Djajadiningrat, Surna T., 1994, "Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Nomor I, ICEL, Jakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1992, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Cetakan II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan XIV, Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta

- Hartiningsih, Maria M., "Menulis Laporan Mengenai Lingkungan", dalam Atmakusumah *et.al* (eds), 1996, *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*, Cetakan I, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Cetakan I, Airlangga University Press, Surabaya
- Sudjana, Eggi, dan Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Cetakan I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### b. Surat Kabar :

- Kedaulatan Rakyat, 17 Agustus 1997, *Unsur-unsur Pendukung Lingkungan*, Yogyakarta

